

BAB I PENDAHULUAN

Biro Humas merupakan satu dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Biro Humas merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Satuan Organisasi Tata Kerja Biro Humas dibentuk berdasarkan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan ini juga didukung oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pemantuan dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat.

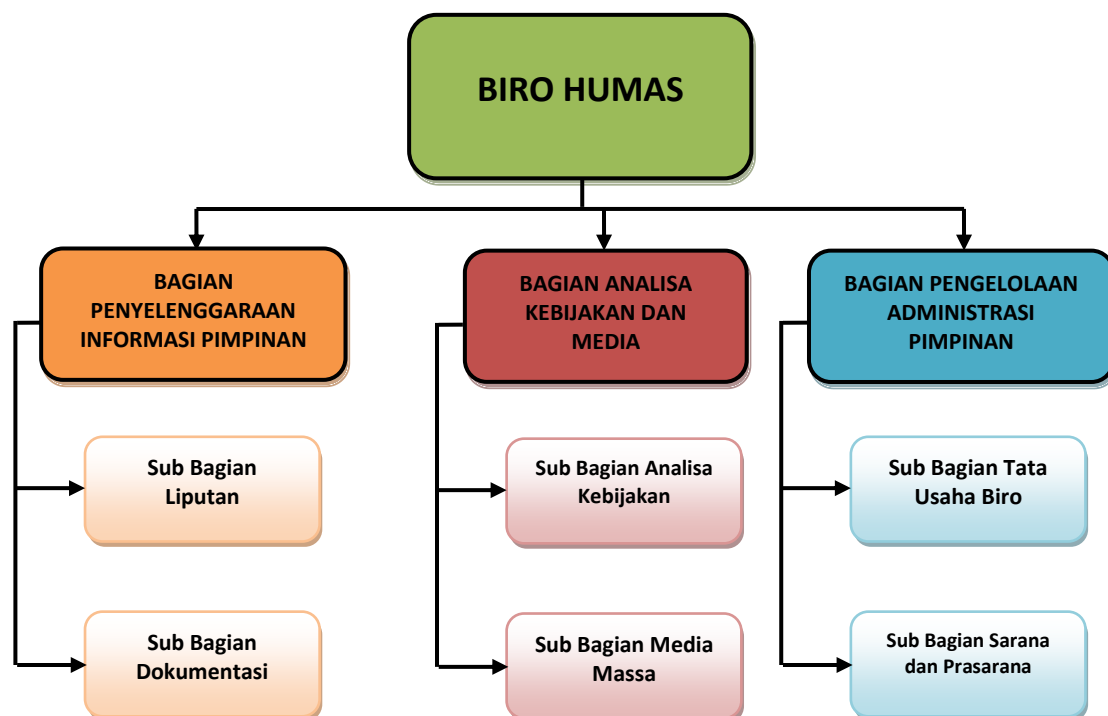
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat pimpinan daerah dan sekretariat daerah.

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi tiga Bagian dan enam Sub-Bagian sebagaiberikut:

1. Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 2 Sub-Bagian yaitu Liputan dan Dokumentasi.
2. Bagian Analisa Kebijakan dan Media Massa yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 2 Sub-Bagian yaitu Analisa Kebijakandan Media Massa.
3. Bagian Pengelolaan Administrasi Pimpinan yang dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang membawahi 2 Sub-Bagian yaitu Tata Usaha dan Sarana dan Prasarana.

Bagan I.1.
Struktur Organisasi Biro Humas



Adapun isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Biro Humas adalah:

1. Kurangnya Jumlah SDM peliputan Humas untuk meliput kegiatan pimpinan (Gubernur, Wagub dan Sekda);
2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan bagi mitra kerja humas;

3. Lemahnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD provinsi maupun OPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melaksanakan fungsi kehumasan;
5. Jumlah dan kualitas aparatur belum memadai untuk menjalankan tupoksi kehumasan.

Di Tingkat Provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah 'Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera'. Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, salah satunya **(Misi 2)** yaitu 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional' yang dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk **meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel** dengan sasaran **"meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan"**.

Biro Humas adalah salah satu unit kerja termasuk penanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi dalam RPJMD 2016-2021.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Misi 2 pemerintah Provinsi ini, Biro Humas telah menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang akan diwujudkan dengan penerapan sejumlah sasaran strategi yang mengacu pada RPJMD 2016-2021, yakni :

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas menerjemahkan Visi Pembangunan tersebut ke dalam Visi Pembangunan Biro Humas Tahun 2016-2021, yakni:

**"Terwujudnya penyelenggaraan publikasi kehumasan pemerintah
Provinsi Sumatera Barat yang dinamis dan professional"**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan ini, Biro Humas menetapkan Misi, sebagai berikut:

"Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah Sumatera Barat"

Guna menindaklanjuti misi tersebut, Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Renstra Biro Humas 2016-2021, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dipercaya masyarakat;

Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan 1 'Penyelenggaraan Pemerintahan dipercaya masyarakat', yakni:
 - 1) Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, agenda pembangunan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berbagai program yang akan dicapai. Program-program RPJMD yang terkait dengan peran, tugas pokok dan fungsi Biro Humas adalah: Program penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi provinsi pada RPJPD dan RPJMD Tahun 2016-2021 serta kondisi umum pemerintahan saat ini, maka arah kebijakan Biro Humas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Strategi dan arah kebijakan Biro Humas Setda Prov. Sumbar

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur Peningkatan penerapan nilai-nilai integrasi dalam birokrasi untuk membentuk	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat atas informasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		karakter dan kultur birokrasi yang bersih		

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Penetapan Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Rencana Kinerja yang akan dicapai Biro Humas pada Tahun 2017 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Biro Humas dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2017 adalah tahun kedua untuk Biro Humas dalam periode 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Rencana Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
----	-------------------	-------------------	----------------

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Barat	Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi di Media Massa	Rangking 13 Nasional
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	Ratio pemberitaan	40 : 40 : 20
3.	Meningkatnya Tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (61)
		2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	90%

B. PENETAPAN KINERJA

Rencana kerja sasaran di atas akan dapat dicapai dengan melaksanakan program maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja keluaran Biro Humas secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Biro Humas

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Peningkatan sebaran kegiatan Pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	60%
1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	100%
2. Koordinasi Kehumasan	Jumlah pelaksanaan Bakohumas provinsi	100%
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	Persentase publikasi melalui media cetak	60%
4. Penyebarluasan Informasi melalui Elektronik	Persentase publikasi melalui media elektronik	60%
5. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	Tersedianya informasi pembangunan daerah melalui buku visualisasi	100 Buku
6. Pembuatan Film Dokumenter	Persentase informasi potensi daerah melalui film dokumenter	40%
7. Penyebarluasan Informasi melalui media ruang	Persentase publikasi melalui media luar ruang	60%

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8. Pengkajian Analisis Pemberitaan	Ratio pemberitaan	40 :40:20

C. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel II.3. Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1.	> 84%	Sangat baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Biro Humas tahun 2017 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja. Terdapat 4 indikator kinerja sasaran, maka masing-masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 25% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Terhadap indikator dengan target kinerja berupa batas tertinggi yang harus dipenuhi. Pengukuran kinerja untuk target yang seperti ini dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi maximize).
4. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Humas tahun 2017 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Humas tahun 2017 dengan realisasinya.

Hasil pengukuran terhadap indikator indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Humas tahun 2017 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel III.1.
Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Biro Humas Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Barat	Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi di Media Massa	Rangking 13 Nasional	Rangking 12 Nasional	108,33
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	Ratio pemberitaan	40 : 40 : 20	37 : 39 : 24	91,11
Meningkatnya Tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (61)	CC (58,27)	95,52
	2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	90%	91,88%	102,09
PENCAPAIAN RATA-RATA				99,26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 4 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 3 sasaran strategis tahun 2017 adalah 99,26%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 99,26% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa keseluruhan atau 100% indikator kinerja termasuk kategori berhasil dengan tingkat capaian >84%, dengan kata lain tidak ada indikator kinerja yang tergolong gagal.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Biro Humas tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel III.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

Adapun analisa dari pencapaian keempat sasaran strategis dari Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel III.1 diatas akan diuraikan sebagai berikut:

I. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Barat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel III.2 :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi di Media Massa	Rangking 13 Nasional	Rangking 12 Nasional	108,33

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 108,33%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi a. Sumber Data

Data bersumber dari data primer teradap jumlah pemberitaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat padamedia cetak dan elektronik pada skala nasional selama jangka waktu Januari hingga Desember Tahun 2017. Semakin banyak penyebaran informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah, semakin tinggi pulapengetahuan, kepercayaan dan dukungan masyarakat maupun stakeholder terkait terhadap kinerja pemerintah.

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan dalam penentuan peringkat sebaran kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

c. Metodologi Perhitungan

Penentuan peringkat sebaran kegiatan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan monitoring pemberitaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada media cetak maupun elektronik di seluruh Indonesia. Selanjutnya dari inventarisasi tersebut dilakukan perbandingan terhadap pemberitaan pelaksanaan kegiatan oleh 33 Provinsi lain di Indonesia.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

Target peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada media massa pada Tahun 2017 ini adalah ranking 13 Nasional dari 34 Provinsi se-Indonesia. Dari target yang ditetapkan tersebut, realisasi peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada media massa adalah ranking 12. Sehingga perhitungan realisasi sasaran (capaian batas tertinggi) adalah sebagai berikut:

$$\frac{13}{12} \times 100\% = 108,33\%$$

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir

Dalam penyelenggaraan pemberitaan, terjadi kenaikan liputan media terkait penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media cetak yaitu dari 29.994 berita pada Tahun 2016 menjadi 39.696 berita pada Tahun 2017 dengan persentase kenaikan 32,34%. Sedangkan pada media online dari 93.960 berita pada Tahun 2016 menurun menjadi 87.123 berita pada Tahun 2017. Namun untuk posisi penyebaran kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tingkat nasional menurun, dari posisi 11 pada Tahun 2016 menjadi posisi 12 pada Tahun 2017. Begitu juga untuk posisi pemberitaan Gubernur Sumatera Barat menurun, dari posisi ke-13 menjadi posisi ke-16.

Perbandingan realisasi-realisasi tersebut, lebih jelas ditampilkan pada tabel berikut:

Diagram III.1 Perbandingan Liputan Media Provinsi Sumatera Barat

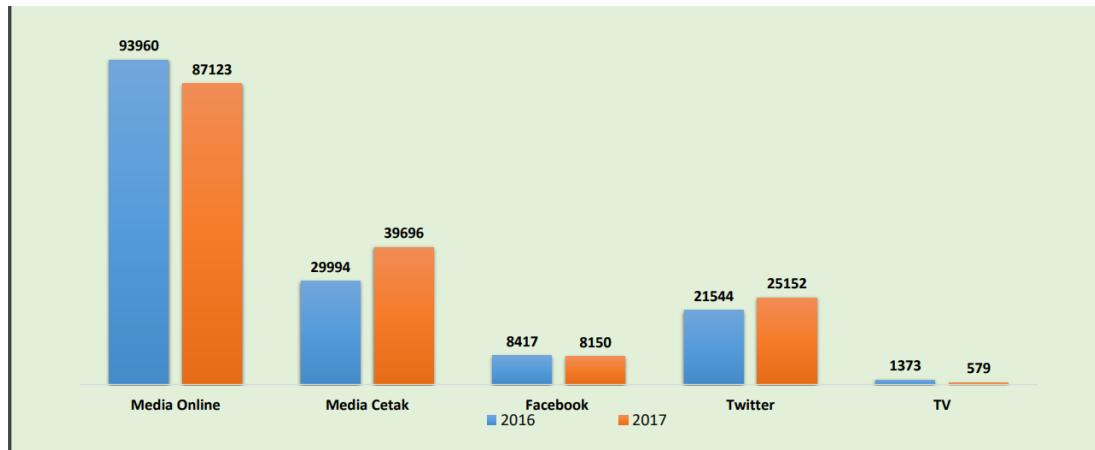


Diagram III.2 Penyebaran Pemberitaan Kegiatan Pemprov. Sumbar

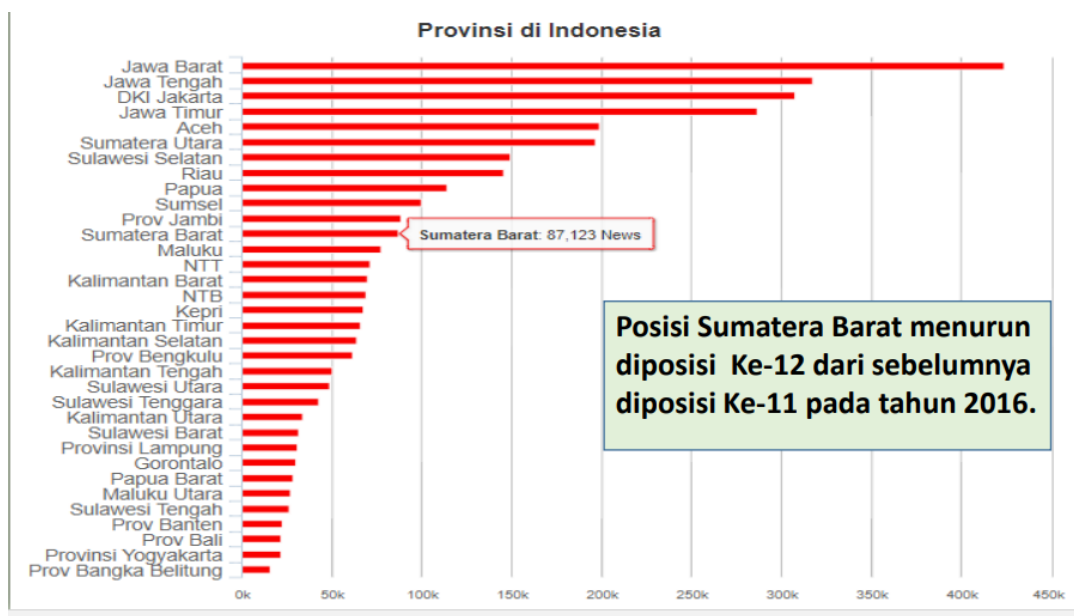
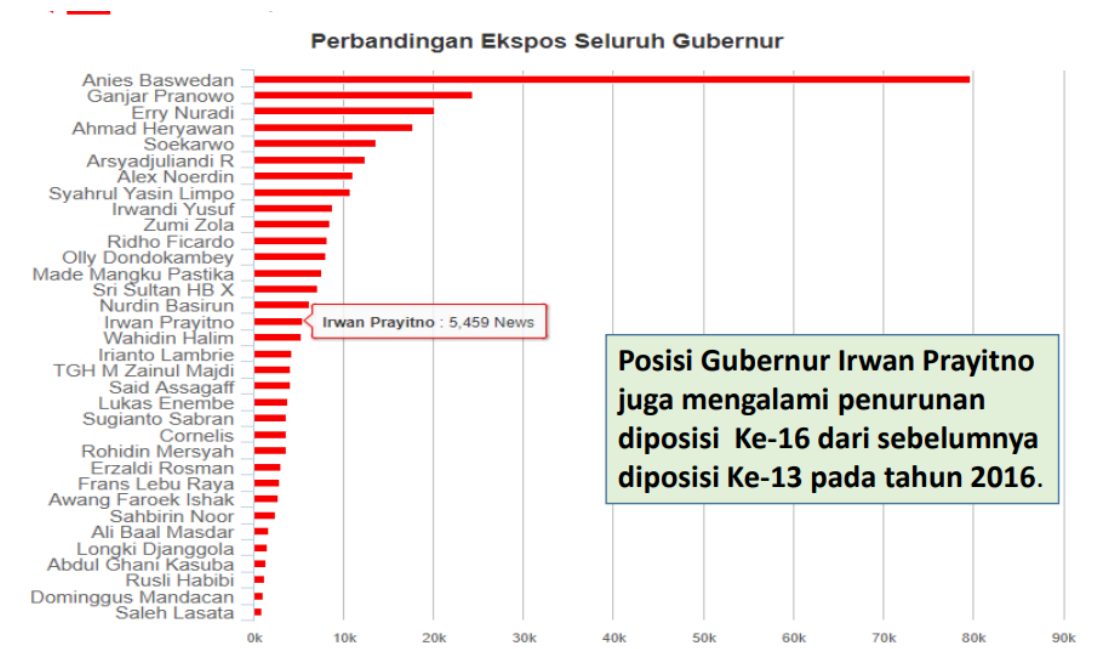


Diagram III.3 Perbandingan Ekspos Gubernur se-Indonesia



Dikarenakan belum adanya penetapan indikator sasaran ini pada tahun 2015, sehingga perbandingan pencapaian sasaran hanya dapat ditampilkan dari tahun 2016.

Untuk ekspos OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata merupakan OPD yang paling aktif selama tahun 2017 dibandingkan OPD lainnya. Tingginya ekspos tersebut disumbang dari sejumlah kehadiran Dinas Pariwisata pada event besar berskala internasional seperti Tds dan komitmen Pemprov Sumatera Barat dalam mengembangkan pariwisata halal, sebagaimana ditampilkan pada diagram berikut:

Diagram III.4 Perbandingan Ekspos OPD Sumbar Tahun 2017



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator ini pada tahun 2017 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Humas 2016 – 2021 adalah peringkat 13 nasional, terealisasi pada peringkat di atasnya, yaitu peringkat 12 nasional. Maka target tahun kedua pada Renstra 2016 – 2021 untuk indikator telah terpenuhi bahkan melebihi target. Apabila kecenderungan pencapaian ini dapat dipertahankan, maka target pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai. Namun demikian, ke depan sangat diharapkan dukungan baik dari segi penambahan Sumber Daya Manusia maupun pendanaan dalam pencapaian sasaran ini, seiring dengan meningkatnya tantangan Globalisasi Media.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan standar nasional

Mengingat target untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah merupakan standar nasional, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 adalah sama dengan standar nasional yaitu tercapai melebihi target yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Tingginya kesadaran aparatur Biro Humas terhadap tupoksi serta tanggungjawabnya akan pelaksanaan tugas sebagai penyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

2. Terbangunnya kerjasama yang baik dengan media massa sebagai sarana penyebaran informasi.

Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada mahasiswa yang terlibat dalam Pers Kampus untuk dapat membantu penyebaran informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan informasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan anggaran pada DPA Biro Humas sebesar Rp. 5.274.744.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.555.921.188,- atau 86,37%. Dimana dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat sangat baik (>84%). Hal ini tidak terlepas dari perencanaan serta konsistensi aparatur Biro Humas dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.

Sumber daya manusia dalam pencapaian indikator ini selain Biro Humas adalah juga melibatkan Pers dan Instansi terkait lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 3 kegiatan utama yaitu Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah, Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak dan Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Elektronik serta didukung juga oleh 3 kegiatan pendukung yaitu Pembuatan Film Dokumenter, Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Ruang dan Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan. Keenam kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

II. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel III.3 :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Ratio Pemberitaan	40 : 40 : 20	37 : 39 : 24	91,11

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 91,11%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari data primer terhadap sentiment/sifat pemberitaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada media cetak dan elektronik di seluruh indonesia selama jangka waktu Januari hingga Desember Tahun 2017.

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan dalam penentuan peringkat sebaran kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

c. Metodologi Perhitungan

Penentuan peringkat sebaran kegiatan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan monitoring pemberitaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada media cetak maupun elektronik di seluruh indonesia. Selanjutnya dari inventarisasi tersebut dilakukan analisa terkait bagaimana sifat pemberitaan tersebut (positif, netral atau negatif).Adapun suatu berita dikatakan

positif adalah jika pemberitaan tersebut mempunyai output sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, netral jika hanya bermaksud sebagai pemberitaan dan negatif jika akan menjadi suatu faktor pengganggu/penghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

Target ratio pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada media massa pada Tahun 2017 ini adalah dengan perbandingan 40 : 40 : 20 (positif : netral : negatif). Dari target yang ditetapkan tersebut, realisasi ratio pemberitaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada media massa adalah 37 : 39 : 24. Sehingga perhitungan realisasi sasaran adalah sebagai berikut:

➤ Positif:

$$\frac{37}{40} \times 100\% = 92,5\%$$

➤ Netral:

$$\frac{39}{40} \times 100\% = 97,5\%$$

➤ Negatif (capaian batas tertinggi):

$$\frac{20}{24} \times 100\% = 83,3\%$$

$$\text{Persentase capaian : } \frac{(92,5 + 97,5 + 83,3)}{3} \times 100\% = 91,11\%$$

Dengan demikian, porsi pemberitaan dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat relatif berimbang dan sehat.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016, terjadi pergeseran sentiment pemberitaan pada tahun 2017 yang tergambar pada diagram berikut:

Diagram III.5 Sentimen Pemberitaan Tahun 2015 dan 2016

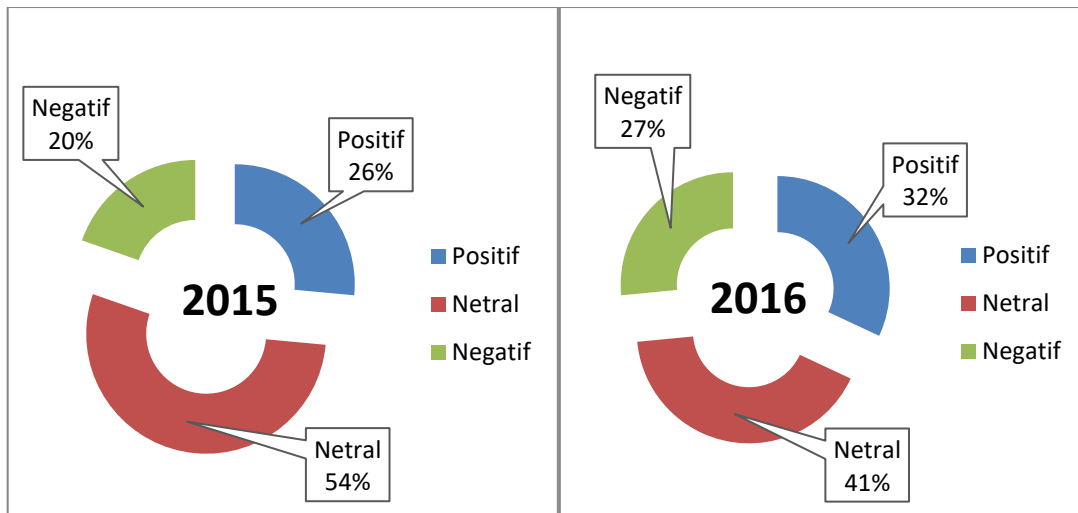
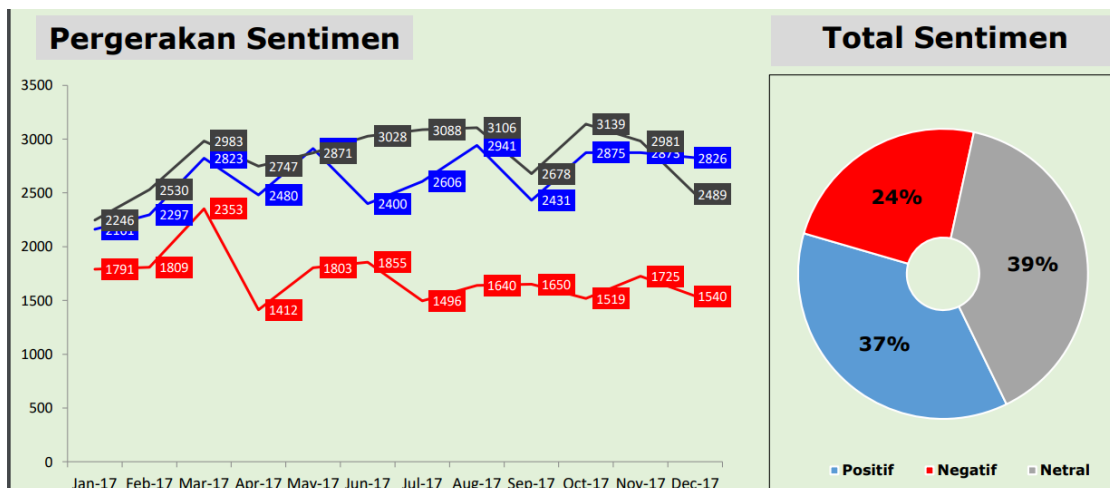


Diagram III.6 Pergerakan dan Sentimen Pemberitaan Tahun 2017

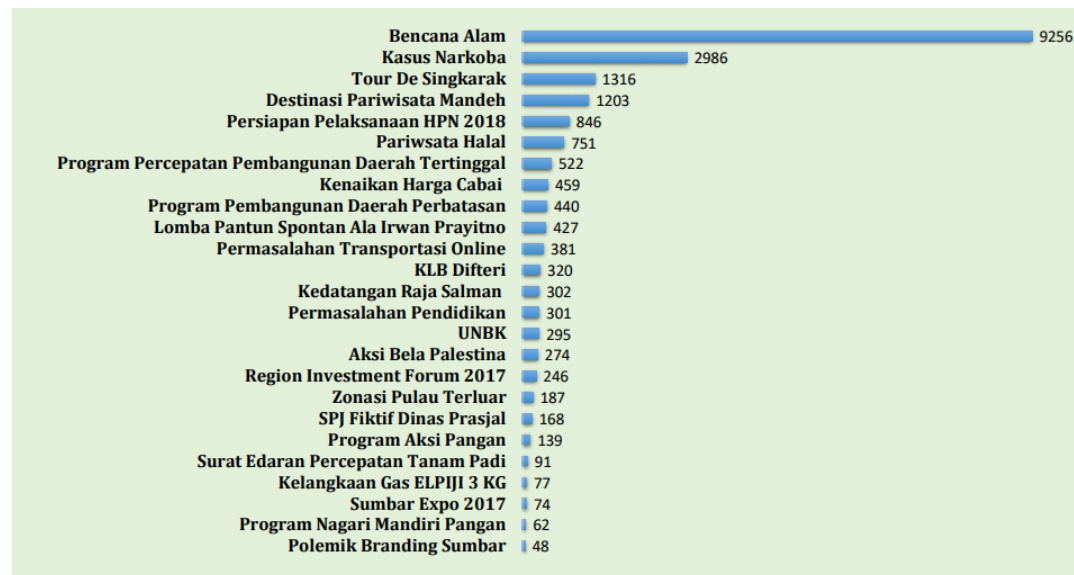


Dilihat dari diagram diatas terjadi pergeseran pemberitaan kearah yang lebih baik pada tahun 2017 yaitu sentiment pemberitaan negatif yang berkurang dari 27% pada tahun 2016 menjadi 24%, namun masih tinggi dibanding pada tahun 2015 dengan capaian 20%. Untuk pemberitaan positif mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu dari 26% pada tahun 2015, 32% pada tahun 2016 dan 39% pada tahun 2017. Hal ini tentunya memberikan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, meningkatkan dukungan stakeholder terkait dan tingginya kenyamanan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan.

Adapun topik yang menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 yang paling banyak adalah isu Bencana

Alam (9.256 berita) yang disusul oleh Kasus Narkoba (2.986 berita) dan Tour de Singkarak (1.316 berita), seperti yang tergambar pada diagram berikut:

Diagram III.7 Isu Utama Pemprov Sumatera Barat Tahun 2017



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator sasaran ini pada tahun 2017 yang merupakan tahun kedua di dalam dokumen Renstra Biro Humas 2016 – 2021 adalah 40 : 40 : 20, yang juga merupakan target dari capaian akhir Renstra Tahun 2016 – 2021, dengan realisasi 37 : 39 : 24 atau 91,11%. Sehingga target tahun kedua pada Renstra 2016 – 2021 untuk indikator telah terpenuhi. Apabila kecenderungan pencapaian ini dapat dipertahankan, maka target pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai. Namun demikian, ke depan sangat diharapkan dukungan dari media massa dan stakeholder terkait dalam pencapaian sasaran ini, seiring dengan mudah dan maraknya penyebaran informasi pada saat ini.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Terbangunnya kerjasama yang baik dengan media massa sebagai sarana penyebaran informasi.
2. Aparatur Biro Humas yang cepat tanggap dalam menggali informasi-informasi yang tengah beredar di masyarakat.

Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dan juga media massa untuk meredam informasi-informasi negatif yang beredar di kalangan masyarakat.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan anggaran pada DPA Biro Humas sebesar Rp. 584.326.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 550.041.693,- atau 94,13%. Dimana dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat sangat baik (>84%). Hal ini tidak terlepas dari perencanaan serta konsistensi aparatur Biro Humas dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.

Adapun sumber daya manusia dalam pencapaian indikator ini selain Biro Humas adalah juga melibatkan Pers dan Instansi terkait lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 2 kegiatan utama yaitu Pengkajian Analisa Pemberitaan dan Koordinasi Kehumasan serta didukung juga oleh 3 kegiatan pendukung yaitu Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah, Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak dan Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Elektronik. Kelimakegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

III. Meningkatnya tata kelola organisasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.4 :
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (61)	CC (58,27)	95,52
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	90	91,88	102,09
PENCAPAIAN RATA-RATA			98,80

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 98,80%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

I.1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

1. Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari data primer yaitu hasil evaluasi Lakip Biro Humas tahun 2016.

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan dalam penentuan peringkat sebaran kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan lain yang juga menjadi acuan penilaian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

c. Metodologi Perhitungan

Penentuan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan pencapaian nilai evaluasi Lakip pada tahun 2016. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan

target nilai evaluasi Lakip berdasarkan Penetapan Kinerja Kepala Biro Humas dengan Gubernur pada Tahun 2016.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2017 ini adalah B (61). Dari target yang ditetapkan tersebut, realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah CC (58,27). Sehingga perhitungan realisasi sasaran adalah sebagai berikut:

$$\frac{58,27}{61} \times 100\% = 98,80\%$$

Dengan demikian akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Biro Humas relatif baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator sasaran ini pada tahun 2017 yang merupakan tahun kedua di dalam dokumen Renstra Biro Humas 2016 – 2021 adalah B (61), dengan realisasi CC (58,27) atau 98,80%. Realisasi pada tahun 2017 memang belum dapat mencapai target, akan tetapi nilai yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Biro Humas akan berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya dengan dukungan dari seluruh kegiatan yang ada pada Biro Humas.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 terhadap target nasional tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena terbangunnya kerjasama yang baik antara aparaturnya pada Biro Humas. Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menyusun

perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan kegiatan mulai dari Renstra, Renja, dan Lakip yang selaras dengan RPJMP dan RPJMD.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan anggaran pada DPA Biro Humas sebesar Rp. 129.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.184.000,- atau 85,92%. Dimana dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat sangat baik (>84%). Hal ini tidak terlepas dari perencanaan serta konsistensi aparatur Biro Humas dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 2 program yaitu Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 4 kegiatan utama yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, Penatausahaan SKPD, Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan OPD, dan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD serta didukung juga oleh seluruh kegiatan pendukung di luar kegiatan utama pada Biro Humas. Keseluruhan kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

I.2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan

1. Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari data primer terkait pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017. Dimana selama tahun 2017 Biro Humas telah melaksanakan 29 kegiatan dari 6 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset serta Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan dalam penentuan capaian sasaran ini adalah:

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

c. Metodologi Perhitungan

Penentuan capaian indikator sasaran strategis ini dilakukan berdasarkan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Biro Humas Seretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

Target indikator capaian sasaran ini adalah 90%. Dari target yang ditetapkan tersebut, capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta keuangan Biro Humas adalah 91,88%. Sehingga perhitungan realisasi sasaran adalah sebagai berikut:

$$\frac{91,88}{90} \times 100\% = 102,09\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator sasaran ini telah terlaksana dengan sangat baik, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir

Dikarenakan indikator sasaran persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan ini merupakan yang pertama pada tahun 2017 ini, sehingga tidak ada perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator sasaran ini pada tahun 2017 yang merupakan tahun kedua di dalam dokumen Renstra Biro Humas 2016 – 2021 adalah 40 : 40 : 20, yang juga merupakan target dari capaian akhir Renstra Tahun 2016 – 2021, dengan realisasi 37 : 39 : 24 atau 91,11%. Sehingga target tahun kedua pada Renstra 2016 – 2021 untuk indikator telah terpenuhi. Apabila kecenderungan pencapaian ini dapat dipertahankan, maka target pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai. Namun demikian, ke depan sangat diharapkan dukungan dari media massa dan stakeholder terkait dalam pencapaian sasaran ini, seiring dengan mudah dan maraknya penyebaran informasi pada saat ini.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Terbangunnya kerjasama yang baik antar sesama aparatur pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kesadaran aparatur Biro Humas terhadap tugas pokok dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diamanatkan kepadanya.

Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan anggaran pada DPA Biro Humas sebesar Rp. 7.959.354.192,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.665.903.352,- atau 83,75%. Dimana dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat baik (69% - 84%). Hal ini tidak terlepas dari perencanaan serta konsistensi aparatur Biro Humas dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.

Adapun sumber daya manusia dalam pencapaian indikator ini selain Biro Humas adalah juga melibatkan unsur dari Instansi terkait lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator sasaran ini adalah sebanyak 6 program dan 29 kegiatan yang termasuk dalam keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2017 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 7.959.354.192,-. Hingga 31 Desember 2017, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 83,75% atau sebesar Rp. 6.665.903.352,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5 Realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.218.897.792	1.139.031.544	93,45
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	10.000.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	138.000.000	116.247.400	84,24
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	17.000.000	16.305.350	94,16
4	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	11.927.900	79,52
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	36.071.792	36.016.300	99,85
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	320.000.000	306.348.000	95,73
7	Penyediaan makan dan minum	21.500.000	21.412.000	99,59
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	592.326.000	556.135.594	93,26
9	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	65.000.000	64.639.000	99,44
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	263.407.500	178.276.062	67,68
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	78.057.500	76.088.392	97,48
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	27.750.000	15.585.000	56,16

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
12	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan	15.000.000	7.313.000	48,75
13	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	92.600.000	79.289.670	85,63
14	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	50.000.000	0	0
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	42.414.000	42.124.000	99,32
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	42.414.000	42.124.000	99,32
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	94.000.000	90.700.000	96,49
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.000.000	9.866.000	98,66
17	Penatausahaan SKPD	84.000.000	80.834.000	96,23
V	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN KEGIATAN & ASET	35.400.000	20.484.000	73,86
18	Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan OPD	7.000.000	6.940.000	99,14
19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	28.400.000	13.544.000	47,69
VI	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.305.234.900	5.195.287.746	82,40
20	Liputan kegiatan pemerintah daerah	1.456.427.000	1.280.687.150	87,93
21	Koordinasi Kehumasan	139.326.000	122.354.175	87,82
22	Penyebaran informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	1.520.000.000	1.501.005.100	98,75
23	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	1.169.441.900	733.577.943	62,73
24	Pengkajian Analisis Pemberitaan	445.000.000	427.687.518	96,11
25	Pembuatan Film Dokumenter	120.000.000	110.892.595	92,41
26	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Ruang	922.540.000	847.207.700	91,83
27	Laporan khusus visualisasi pembangunan	86.336.000	82.550.700	95,62
28	Rapat Koordinasi PPID Provinsi	35.00.000	0	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Kabupaten/Kota Sesumbar			
29	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	250.000.000	0	0

Sedangkan selama periode tahun 2016-2021, jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 14.748.874.556,- atau sebesar 82,40% dari total anggaran sebesar Rp. 17.899.978.192,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6 Pagu dan realisasi anggaran Biro Humas 2016-2021

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	9.940.624.000	8.082.971.204	81,31
2	2017	7.959.354.192	6.665.903.352	83,75
3	2018			
4	2019			
5	2020			
6	2021			
JUMLAH		17.899.978.192	14.748.874.556	82,40

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah menyajikan sejumlah keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Biro Humas pada tahun anggaran 2017 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum, capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMN.

Biro Humas yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat, pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat bersyukur karena hingga penghujung tahun 2017 komunikasi antara pemerintah daerah dan publik dapat terjaga dengan baik hingga tidak bermuara pada perkembangan isu-isu negatif terkait kinerja pemerintah daerah yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan dan stabilitas masyarakat.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2017, secara keseluruhan pencapaian kinerja Biro Humas pada Tahun 2017 berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 99,26%, dengan realisasi anggaran sebesar 83,75%.

Disadari bahwa laporan ini belum sempurna sebagaimana diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sudah mendapatkan sedikit gambaran kinerja yang dilakukan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017. Dengan berbagai permasalahan yang masih ada, Biro Humas akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan di setiap level dan bagian organisasi untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di depan.